

**“PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN
DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PROVINSI LAMPUNG DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM”**



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)

Oleh :

**Tofan Wahyu Dwi Prasetyo
NPM.1351010232**

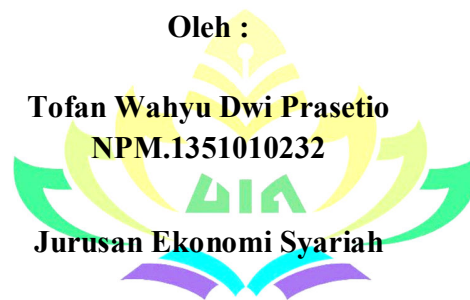
Jurusan Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2018 M**

**“PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN
DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PROVINSI LAMPUNG DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)



Pembimbing I : Any Eliza, SW., M.Ak
Pembimbing II : Fatih Fuadi, S.E.I., M.SI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2018 M

ABSTRAK

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh

Tofan Wahyu Dwi Prasetyo

Pemerintah Provinsi Lampung harus mengalokasikan 20% dari total APBD untuk sektor pendidikan sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 49 tentang pendidikan dan harus mengalokasikan 10% dari total APBD untuk sektor kesehatan sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009 Pasal 171 tentang kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandar Lampung menurut Badan Pusat Statistik (BPS).. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kota Bandar Lampung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung serta tinjauan ekonomi islam terhadap pembangunan SDI. Data yang digunakan adalah data runtun waktu (*time series*) selama periode 2009-2016. Pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis *regresi berganda*.

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Peranan Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pembangunan SDI Di Provinsi Lampung khususnya dari hasil penelitian yang penulis lakukan sudah menunjukkan bahwa pemerintah sudah mempunyai peranan yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan untuk menggerakan Pembangunan khususnya SDI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembangunan SDI yang ada di Provinsi Lampung yang meliputi pendidikan, kesehatan, perekonomian, seperti

sekolah, tempat pelayanan kesehatan, industri usaha kecil, tempat membuat usaha kerajinan tangan dan masih banyak yang lainnya.

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia



MOTTO

أَلْيَوْمَ كَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu.” (Q.S. Al-Maidah (5): 3)



PERSEMBAHAN

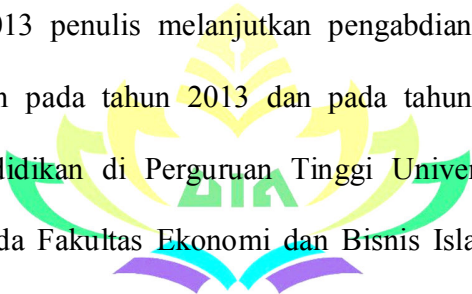
Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Bambang Upoyo (Alm) dan Ibu Tri Wahyu Anita Vitarina. Yang saya hormati dan saya banggakan. Selalu menguatkan saya sepenuh jiwa raga, merawat saya, memotivasi saya dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan mendoakan saya agar selalu ada dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah swt dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Saudara-saudara saya kak Putri, kak Nanang, kak Jaka dan keponakan-keponakan tersayang. Berkat doa, dukungan dan senyum semangatnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Sahabat seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2013 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung.
4. Sahabat dan keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah dan Komisariat Persiapan FEBI UIN Raden Intan Lampung. Terima kasih untuk ilmu yang tidak saya dapatkan dimanapun.
5. Almamater yang penulis banggakan, UIN Raden IntanLampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugrahi nama Tofan Wahyu Dwi Prasetyo oleh ibu dan bapak yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Dilahirkan pada tanggal 11 Mei 1993 di Bandar Lampung Kecamatan kemiling Sumberejo ,Lampung. Riwayat

Pendidikan Penulis dimulai di SDN 01 Beringin Raya dan diselesaikan pada Tahun 2005, setelah itu melanjutkan pendidikan pada tahun 2005 di SMP-SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dan diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 penulis melanjutkan pengabdian di Pondok modern Arafah Jambi diselesaikan pada tahun 2013 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Provinsi Lampung Tahun 2009-2016)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) dalam bidang ilmu Ekonomi Islam.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.

2. Madnasir, S.E., M.Si, dan Deki Fermansyah, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Any Eliza, S.E., M.AK. dan Fatih Fuadi, M.S.I., selaku pembimbing I dan II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Terimakasih kepada tim Munaqasyah.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
6. Sahabat serta saudara seperjuangan Galuh Wahyu Pramana, Chairul Ichwan, Fallahuddin dan Armando Miharja yang selama ini menjadi penasihat, penyemangat, selalu mendengar keluh kesah saya, dan selalu menjadi motivasi saya untuk terus maju dan pantang menyerah.
7. Sahabat-sahabat ku “The Cobra” Briandika Ramadhanu, Ibnu Al-Rasyid, Rangga Kemala Intan, Briandika Ramadhanu, Kukuh Suharyono, Muhammad Hafidz Zakni, Wenny Shofura Priliana, Anida Wati, Melya Andeska, Nurul Hafizah, Euis Laili Hardiyanti, Linggar Wigati dan teman-teman kelas F Ekonomi Syariah angkatan tahun 2013 yang selama ini menjadi teman yang baik dalam bertukar informasi, berbagai keluh kesah serta keceriaan.
8. Sahabat-sahabatku yang selalu menyayangiku dan mendukungku Agung Suryono, Abdul Aziz, Andi Kendor, M. Nopio, Ricart Vernando

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah Ekonomi Islam.

Bandar Lampung, Desember 2018

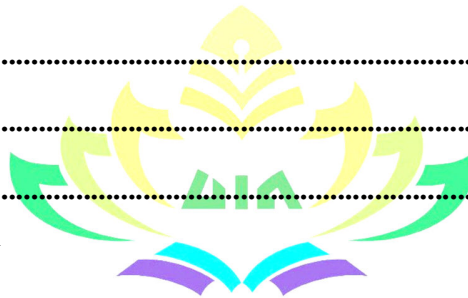
Penulis,

Tofan Wahyu Dwi Prasetyo
NPM. 1351010232



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
1. Pengaruh.....	1
2. Pengeluaran Pemerintah.....	1
3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	2
4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.....	3
5. Indeks Pembangunan Manusia	4
B. Alasan Memilih Judul.....	4
1. Alasan Obyektif.....	4
2. Alasan Subyektif.....	5
C. Latar Belakang Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	14



E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Manfaat Penelitian	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengeluaran Pemerintah	16
1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah	16
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pengeluaran Pemerintah	16
3. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah	17
4. Teori Pengeluaran Pemerintah Secara Makro	19
5. Pengeluaran Pemerintah Secara Makro	19
6. Pengeluaran Daerah	21
B. Indeks Pembangunan	
Manusia	23
1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia	23
2. Komponen Indeks Pembangunan Manusia	28
3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	29
4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	34
C. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan Dan Kesehatan)	
Dengan IPM	35
D. Pembangunan Sumber Daya Insani (SDI) Dalam Perspektif Ekonomi Islam	37
E. Kerangka pemikiran	49
F. Penelitian Terdahulu	50
G. Hipotesis	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	59
1. Jenis Penelitian	59
2. Sifat Penelitian	60

B. Jenis dan Sumber Data	60
C. Teknik Pengumpulan Data	61
1. Dokumentasi	61
2. Studi Pustaka.....	62
D. Populasi Dan Sempel.....	62
E. Definisi Oprasional Variabel.....	63
1. Variabel Terikat.....	63
2. Variabel Bebas.....	63
F. Metode analisis Data.....	65
1. Uji Asumsi Klasik.....	65
a. Uji Normalitas	66
b. Uji Multikolinearitas	66
c. Uji Autokorelitas.....	67
d. Uji Heteroskedastisitas	67
2. Uji Hipotesis.....	68
a. Uji F atau Uji Simultan	68
b. Uji t atau Uji Parsial	68
3. Koefisien Determinasi	69
4. Regresi Linear Berganda	69

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	71
1. Gambaran umum Provinsi Lampung	71
B. Uji Asumsi Klasik.....	75
1. Uji Normalitas.....	75
2. Uji Multikolineritas	76
3. Uji Autokorelasi.....	77
4. Uji heteroskedastisitas	78

C. Uji Hipotesis.....	79
1. Uji F.....	79
2. Uji t.....	80
3. Uji Koefisien Determinasi	82
D. Pembahasan Hasil Ujian.....	85
1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM	85
2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap IPM.....	86
3. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pembangunan Sumber Daya Insani di Provinsi Lampung	87

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2009-2016	8
Tabel 2. Nilai Maksimum dan Nilai Minimum IPM.....	29
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	51
Tabel 4. Daftar Operasional Variabel	64
Tabel 5. Data BPS Kabupaten/Kota.....	73
Tabel 6. Uji Normalitas.....	74
Tabel 7. Hasil Uji Multikolineritas	75
Tabel 8. Hasil Uji Runs Test.....	76
Tabel 9. Hasil Uji ANOVA	78
Tabel 10. Hasil Uji t	79
Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	80
Tabel 12. Hasil Regresi Linier Berganda.....	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambaran umum Indeks Pembangunan Manusia	28
Gambar 2. Kerangka Pemikiran	50
Gambar 3. Hasil Heteroskeditas	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Untuk menghindari penyimpangan persepsi yang dimungkinkan timbul, ada baiknya penulis menjelaskan arti dan maksud judul karya ilmiah ini, agar permasalahan yang akan di kaji menjadi lebih jelas dan mudah untuk di pahami. Adapun judul penelitian ini adalah **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Provinsi Lampung Tahun 2009-2016)”** dan berikut ini uraian dari istilah tersebut yang terdiri dari :

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.⁴⁴

2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk

⁴⁴Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta: 2001), h. 102

nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.⁴⁵

3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan adalah wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persendari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan .pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ketingkat yang lebih tinggi.⁴⁶

4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan adalah upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Lains dan Pasay

⁴⁵Galih, (2012), *Analisis Dampak Desentralisasi Fisikal Terhadap Angka Melek Huruf Perempuan Dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan Di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi S1*, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Tahun 2012

⁴⁶Sugiarto A. Santoso dkk, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh*, Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 1 No 4, November 2013, h. 76

yang lebih menekankan aspek pendidikan dalam pembangunan manusia, melihat mutu manusia dari sisi lain yaitu dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan masalah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia.⁴⁷

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.⁴⁸

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Obyektif

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan.⁴⁹ Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Oleh karenanya dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia. Salah satu bukti keseriusan pemerintah tersebut adalah lewat pengeluaran pemerintah yang merupakan cerminan bukti konkrit peran pemerintah dalam mengatur perekonomian.

Sektor pengeluaran pemerintah yang cukup penting dan berpengaruh terhadap pembangunan manusia adalah pengeluaran di bidang pendidikan dan

⁴⁷*Ibid*, h. 77

⁴⁸ Ananta, Prayudha, *Determinan Pembangunan Manusia Provinsi Lampung*, Tesis FEB Universitas Lampung, 2013

⁴⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op. Cit.* h.102

kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah agar pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan searah adalah dengan lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya ketimpangan dan kesenjangan sosial akibat kebijakan yang lebih condong pada pertumbuhan ekonomi.

2. Alasan Subyektif

Karena menurut penulis, kajian tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum banyak yang menyajikan dalam sebuah skripsi, dan terjadinya bahan-bahan atau literatur yang diperlukan dalam penelitian ini memungkinkan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Dipilihnya Provinsi Lampung sebagai tempat penelitian dikarenakan selain tempat asal penulis dan penulis ingin mengetahui kelebihan dan potensi Provinsi Lampung, yang dimana lokasi Provinsi Lampung di gerbang masuk Pulau Sumatra seharusnya gerbang perdagangan dan keluar masuknya perdagangan mampu menaikkan daya jual beli yang berimbas kepada kenaikan IPM Provinsi Lampung. Akan tetapi IPM Provinsi Lampung dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami penurunan ranking yang dari posisi 18 menjadi posisi ke 24.

Selain itu penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari selama menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan konsentrasi pada jurusan Ekonomi Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan.⁵⁰

Paradigma pembangunan di Indonesia mengalami perkembangan dari beberapa tahap sebagai berikut: Pertama, paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*), kedua, pergeseran dari paradigma pertumbuhan menjadi paradigma kesejahteraan (*Welfare paradigm*) dan ketiga, paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development paradigm*). Pendapat Owens yang dikutip oleh Martinus Nanang: Hal terpenting adalah pembangunan manusia, bukan pembangunan benda (*the development of people rather than the development of things*), karena nilai balik riil pembangunan manusia memberikan sumbangan lebih dari pada pembangunan dibandingkan pada pembangunan benda (fisik). Arti dari perkataan tersebut adalah apabila pembangunan manusia pada Negara terdapat pertumbuhan

⁵⁰Mankiw, N.Gregory, *Macroeconomics* 6 th Edition, Worth Publishers 41. Madison Avenue NewYork, NY, 2005

atau baik maka pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara dapat dikatakan baik, karena manusia adalah motor suatu Negara agar bisa tumbuh baik dan berkembang.

Di Indonesia masalah pembangunan manusia menarik untuk dibicarakan. Isu pembangunan manusia merupakan isu sentral yang memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada pertumbuhan, pengembangan sumber daya manusia dan kebutuhan dasar. Sejak disepakatinya *Millenium Development Goals* (MDG's) oleh pemimpin dunia dalam KTT 2000, MDG's merupakan komitmen masyarakat internasional, khususnya negara berkembang terhadap visi pembangunan.

Visi ini menempatkan pembangunan sosial dan ekonomi secara *sustainable* (berkelanjutan). Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah serta jumlah penduduk yang besar ternyata memiliki nilai IPM yang tergolong menengah ke bawah dalam peringkat dunia. Indonesia kini menduduki peringkat 108 dari 187 negara yang ada di dunia publikasi *UNDP*, Tahun 2013).

Posisi peringkat IPM Indonesia merupakan akumulasi dari total angka IPM pada level propinsi yang ada di Indonesia. Tabel 1 menunjukkan bahwa Propinsi Lampung mengalami penurunan dari posisi ke 18 menjadi posisi ke 21 dalam peringkat IPM per propinsi yang ada di Indonesia.

**Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Tiap Provinsi di Indonesia Tahun
2009-2016**

Provinsi / Kabupaten / Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	70.35	67.09	67.45	67.81	68.3	68.81	69.45	70
Sumatera Utara	72.78	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51	70
Sumatera Barat	72.23	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98	70.73
Riau	74.63	68.65	68.9	69.15	69.91	70.33	70.84	71.2
Jambi	71.46	65.39	66.14	66.94	67.76	68.24	68.89	69.62
Sumatera Selatan	71.4	64.44	65.12	65.79	66.16	66.75	67.46	68.24
Bengkulu	71.57	65.35	65.96	66.61	67.5	68.06	68.59	69.33
Lampung	69.78	63.71	64.2	64.87	65.73	66.42	66.95	67.65
Bangka Belitung	71.62	66.02	66.59	67.21	67.92	68.27	69.05	69.55
Kep. Riau	73.68	71.13	71.61	72.36	73.02	73.4	73.75	73.99
Dki Jakarta	76.59	76.31	76.98	77.53	78.08	78.39	78.99	79.6
Jawa Barat	70.71	66.15	66.67	67.32	68.25	68.8	69.5	70.05
Jawa Tengah	70.92	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49	69.98
Di Yogyakarta	74.15	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81	77.59	78.38
Jawa Timur	69.78	65.36	66.06	66.74	67.55	68.14	68.95	69.74
Banten	69.29	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27	70.96
Bali	70.53	70.1	70.87	71.62	72.09	72.48	73.27	73.65
Nusa Tenggara Barat	63.71	61.16	62.14	62.98	63.76	64.31	65.19	65.81
Nusa Tenggara Timur	65.36	59.21	60.24	60.81	61.68	62.26	62.67	63.13
Kalimantan Barat	67.53	61.97	62.35	63.41	64.3	64.89	65.59	65.88
Kalimantan Tengah	73.49	65.96	66.38	66.66	67.41	67.77	68.53	69.13
Kalimantan Selatan	68.01	65.2	65.89	66.68	67.17	67.63	68.38	69.05
Kalimantan Timur	73.77	71.31	72.02	72.62	73.21	73.82	74.17	74.59
Kalimantan Utara	74.68	-	-	-	67.99	68.64	68.76	69.2

Sulawesi Utara	73.77	67.83	68.31	69.04	69.49	69.96	70.39	71.05
Sulawesi Tengah	69.34	63.29	64.27	65	65.79	66.43	66.76	67.47
Sulawesi Selatan	69.62	66	66.65	67.26	67.92	68.49	69.15	69.76
Sulawesi Tenggara	68.32	65.99	66.52	67.07	67.55	68.07	68.75	69.31
Gorontalo	68.83	62.65	63.48	64.16	64.7	65.17	65.86	66.29
Sulawesi Barat	67.72	59.74	60.63	61.01	61.53	62.24	62.96	63.6
Maluku	69.96	64.27	64.75	65.43	66.09	66.74	67.05	67.6
Maluku Utara	67.82	62.79	63.19	63.93	64.78	65.18	65.91	66.63
Papua Barat	67.28	59.6	59.9	60.3	60.91	61.28	61.73	62.21
Papua	63.41	54.45	55.01	55.55	56.25	56.75	57.25	58.05
Indonesia	70.59	66.53	67.09	67.7	68.31	68.9	69.55	70.18

Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka, 2009-2016.⁵¹

Tabel 1 memperlihatkan perkembangan IPM pada seluruh provinsi di Indonesia. Secara keseluruhan perkembangan IPM menunjukkan peningkatan pada periode Tahun 2009 hingga 2016. IPM tertinggi tentu saja diraih oleh DKI Jakarta, karena merupakan ibukota negara sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan mudah dapat diaplikasikan.

IPM terendah dimiliki oleh Papua yang terletak paling timur, jauh dari pusat ibukota. Provinsi Lampung sendiri pada Tabel 1 berada pada peringkat menengah ke bawah. Selama periode 2009 hingga 2016 nilai IPM terus mengalami peningkatan, namun hal ini jika dibandingkan dengan tingkat IPM daerah lain, peringkat Provinsi Lampung secara nasional mengalami penurunan.

⁵¹ BPS 2000-2016, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung*, beberapa terbitan BPS Provinsi Lampung

Selain itu Provinsi Lampung memiliki IPM paling rendah diantara provinsi-provinsi di Pulau Sumatera lainnya, yaitu Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, dan Aceh. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena secara letak geografis, Lampung memiliki letak yang sangat berdekatan dengan ibukota DKI Jakarta, dan Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera. Dengan mengedepankan Salah satu peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan dan kemakmuran adalah peran alokatif dengan peran ini, pemerintah dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada agar optimal dan efisien.

Bentuk nyatanya adalah pemerintah mempunyai kewenangan besar dalam hal pengelolaan fiskal. Fiskal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa cakupan fiskal ini sangat luas, maka apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka fiskal yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Sementara kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam hal ini diarahkan pada parameter yang sudah menjadi parameter internasional dalam hal kesejahteraan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam ilmu ekonomi sektor pendidikan dan kesehatan telah diyakini memainkan peran yang vital dalam pembangunan. Produktivitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat kesehatan yang

berpengaruh pada keberhasilan pendidikan dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi.⁵² Stewart menggambarkan bahwa pembangunan manusia (dalam hal ini kesehatan dan pendidikan) telah menjadikan manusia sebagai pusat pembangunan baik manusia sebagai pelaku maupun sasaran pembangunan.

Pemerintah harus menyediakan sumber pendanaan yang cukup bagi pembangunan manusia dalam bentuk kebijakan pengeluaran anggaran yang tepat sasaran. Menempatkan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan diharapkan dapat menciptakan peluang-peluang yang secara langsung menyumbang upaya memperluas dan meningkatkan kemampuan manusia dan kualitas kehidupan mereka, antara lain melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dasar dan jaminan sosial. Sesuai dengan teori IPM, yang menekankan pentingnya peran pemerintah didalam kedua sektor tersebut.

⁵² Sodik, J., 2007, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 12. No. 1, UVN Veteran Yogyakarta, April 2007, hal. 27-36

Pemerintah harus mengalokasikan 20% untuk sektor pendidikan dan 10% untuk sektor kesehatan dari total APBN mau pun APBD sesuai dengan UU No 20 tahun 2003 Pasal 49 tentang pendidikan dan UU No 36 tahun 2009 Pasal 171 tentang kesehatan. Kriteria-kriteria khusus mutlak di syaratkan agar penerapan ekonomi islam sesuai dengan yang sudah digariskan agar tujuan dari penerapan ekonomi islam dapat tercapai. Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh resources yang ada dimuka bumi, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada dimuka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah dalam QS.Al-Jatsiyat :45:13:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ



Artinya :“Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁵³

Tanggung jawab sebagai pejuang Ekonomi Islam yang diemban umat muslim harus dimaknai kembali sehingga tidak terjebak dalam batasan profesi dan pekerjaan tertentu, sehingga nantinya semua umat muslim benar-benar sadar dan turut ambil bagian dalam memperjuangkan kualitas sumber daya manusia ekonomi Islam sehingga “vitalitas” sumber daya manusia ekonomi Islam di Indonesia mencapai titik

⁵³Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, QS : Jatsyiah 13, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012),

ideal, dalam melaksanakan amanahnya dapat sesuai dengan apa yang telah digariskan tanpa mengurangi makna keterbukaan. Pada dasarnya perkembangan ekonomi Islam yang kini mengalami pertumbuhan yang sangat membanggakan pada hakikatnya merupakan gabungan-gabungan atau akumulasi keberhasilan perorangan yang berkecimpung di dalamnya. Tuntutan dan kewajiban sumber daya manusia ekonomi islam dalam memenuhi nilai dan prinsip syariah dalam seluruh kegiatannya seharusnya di imbangi pula oleh seluruh identitas ekonomi Islam yang terkait, yakni dengan cara memperlakukan sumber daya manusianya dengan perlakuan yang adil, jujur dan mendorong setiap sumber daya manusia untuk terus mengembangkan seluruh potensi, kemampuan, pengalaman serta pengetahuan tentang ekonomi islam.

Dengan Provinsi Lampung sebagai Provinsi terdekat dari Ibu Kota harusnya dapat menjadikan Provinsi Lampung menjadi IPM tertinggi di pulau Sumatera akan tetapi yang terjadi ipm Provinsi Lampung merosot dari tahun ke tahun menjadi urutan 24 di bawah standart rata-rata IPM. Di lain hal masih ada pola hubungan yang terputus-putus antara lembaga pendidikan dan kesehatan dengan perekonomian islam sehingga tidak ada hubungan yang jelas, terlihat dari tidak sesuainya minat dan kemampuan para sumber daya manusia dalam perekonomian Islam.⁵⁴ Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap**

⁵⁴Prof.Dr.H. Viethzal Rivai , MBA, Islamic Human Capital, (Jakarta : Rajawali Pers 2009), h. 4

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Provinsi Lampung Tahun 2009-2016)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung periode 2009-2016?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pembangunan SDI di Provinsi Lampung?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung periode 2009-2016.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap pembangunan Sumber Daya Insani (SDI) di Provinsi Lampung.
- c.



2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi akademik, memberikan sumbangsih pengetahuan dan penilaian terhadap pengaruh sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung, lalu memberi masukan terhadap pihak terkait guna mengetahui keadaan dalam sektor tersebut dan juga dapat menambah literatur di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, khususnya pada Jurusan Ekonomi syariah.
- b. Secara Praktis, bagi penulis merupakan sebagian sarana untuk mempraktekan teori-teori yang didapatkan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
- c. Maanfaat bagi pemerintah, sebagai bahan evaluasi dan sebagai pembanding kinerja pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengeluaran Pemerintah

1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Dalam pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁵ Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa hanya disebut pengeluaran pemerintah, government expenditure atau government purchase meliputi semua pengeluaran dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya.⁵⁶ Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai konsumsi pemerintah, kegiatan-kegiatan dan pengeluaran lainnya guna tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pengeluaran Pemerintah

Menurut Sadono Sukirno dalam buku Marzuki Ilyas faktor yang bersifat ekonomi, politik dan sosial yang mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah, antara lain sebagai berikut:

⁵⁵ Ilyas, Marzuki. 1989. Ilmu Keuangan Negara (Public Finance). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- 1) Faktor yang bersifat ekonomi, adalah yang berhubungan dengan tujuan dalam pencapaian penggunaan tenaga penuh tanpa menimbulkan inflasi sehingga pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh dapat berjalan pesat.
- 2) Faktor bersifat politik dan sosial, adalah faktor yang memakai anggaran pengeluaran yang besar. Seperti menjaga pertahanan dan keamanan negara, bantuan-bantuan sosial, menjaga kestabilan politik dan lainnya.

3. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suparmoko pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Pengeluaran yang *self liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan balas jasa masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan.
- b. Pengeluaran yang *reproduktif*, artinya mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya, pemerintah menetapkan pajak progresif sehingga timbul redistribusi pendapatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.
- c. Pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang secara langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, objek-objek pariwisata dan sebagainya. Sehingga hal ini dapat juga menaikkan penghasilan nasional dalam kaitannya jasa-jasa tadi.

- d. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang menerimanya akan naik.
- e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Jika hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa yang akan datang pasti akan lebih besar.⁵⁷

Menurut Soediyono, Pengeluaran Pemerintah berdasarkan pos pengeluaran pemerintah yang ada di APBN dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran rutin yaitu terkait biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
- b. Belanja pembangunan yaitu terkait biaya yang dikeluarkan untuk mempercepat proses pembangunan yang meliputi sarana dan prasarana ekonomi seperti pembangunan jalan raya, irigasi, listrik dan lain-lain; peningkatan sumberdaya manusia seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan rakyat seperti pembangunan perumahan; peningkatan kapasitas pemerintah seperti pengembangan aparatur pemerintah.

4. Teori Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro

Pengeluaran pemerintah secara mikro dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat adanya

⁵⁷ Subandi, Ekonomi Pembangunan, Bandung : Alfabeta, 2011

kegagalan pasar. Menurut Mangkosoebroto secara mikroekonomi teori perkembangan pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara penawaran dan permintaan untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi faktor-faktor di bawah ini:

- a. Perubahan permintaan akan barang publik
- b. Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- c. Perubahan kualitas barang publik
- d. Perubahan harga faktor- faktor produksi

5. Pengeluaran Pemerintah Secara Makro

Menurut sisi makroekonomi, pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis ukuran pemerintahan sehingga dapat terlihat transaksi anggaran, perusahaan publik dan kebijakan publik. Pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah Model ini dikembangkan oleh

Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi.⁵⁸

Tahap awal perkembangan ekonomi, dimana investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Tahap menengah pembangunan ekonomi, peran pemerintah masih diperlukan tetapi peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peran pemerintah tetap besar karena peranan swasta yang semakin banyak ini menimbulkan kegagalan pasar dan pemerintah harus menyediakan barang publik dalam jumlah kualitas yang lebih baik.

Pada tahap tingkat ekonomi lanjut, aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan sebagainya. Dalam hal ini, Indonesia masih masuk dalam ekonomi menengah dan masih berproses menuju ekonomi lanjut. Karena masih ada investasi pemerintah dan peran investasi swasta yang semakin membesar.⁵⁹

6. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah diperoleh dari seluruh pendapatan daerah yang diterima baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat yang akan

⁵⁸ Mankiw, N. Gregory. 2007. Makroekonomi. Jakarta: Erlangga

⁵⁹ Soediyono. 1989. Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional. Yogyakarta: Liberty.

digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan aktivitas, sehingga belanja dikelompokkan menjadi 2 bagian Yaitu:

- a. Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah dasa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak tersangka.
- b. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai, belanja

barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Versi Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + X - M$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah.⁶⁰

Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut, berikut tahapan-tahapan tersebut:

- a. Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

⁶⁰ Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

- b. Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar.
- c. Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat.

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Pada hakikatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan kebijakan pemerintah dan swasta dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dibuat dan dipopulerkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1996 dalam seri laporan tahunan yang diberi judul “*Human Development Report*” Indeks ini disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara selain pendapatan nasional

perkapita.⁶¹ UNDP mendefinisikan IPM sebagai “*a process of enlarging people’s choice*” atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat.⁶²

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (pendidikan).⁶³ Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat misalnya tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli masyarakat, sedangkan dampak non-fisik dapat dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat.⁶⁴ IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak.⁶⁵

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks

⁶¹ Alison Jackline Lawrence Heka, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara*, Jurbah Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 17 No. 1 Tahun 2017, h. 206

⁶² *Ibid.*

⁶³ Muliza, dkk, *Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Aceh*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol. 3 Nomor 1, Maret 2017, h. 52

⁶⁴ Ayunanda Melliana dan Ismaini Zain, *Analisis Statistika Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Menggunakan Regresi Panel*, Jurnal SAINS dan Seni Pomits Vol. 2 No. 2 Tahun 2013, h. 237-238

⁶⁵ Zulfikar Mohammad Yamin L, *Analisis Faktor-fsktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan Dan Regresi Panel*, Jurnal Of Regional and Rural Development Planning Juni 2017, h. 204

standart hidup layak.⁶⁶ Meningkatnya nilai IPM menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas pada suatu daerah.⁶⁷ Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, hal ini mengindikasikan bahwa manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dengan demikian, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsure pembangunan yang sangat penting.⁶⁸

Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti investasi di sektor pendidikan dan kesehatan.⁶⁹ Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah.

Untuk mendukung aspek pendidikan dan kesehatan dibutuhkan anggaran. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan aspek pendidikan dan kesehatan melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting diantaranya sektor pendidikan dan sektor kesehatan.

⁶⁶*Ibid.* h. 238

⁶⁷ Muliza, dkk, *Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Aceh*, Jurnal Perspektif Darussalam Vol. 3 No. 1 Maret 2017, h. 52

⁶⁸Muliza, *Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) disusun dari komponen pembangunan manusia yang dianggap menjadi dasar yaitu:

- a. Ketahanan Hidup/Usia Hidup (*Longevity*), diukur dengan harapan hidup pada saat lahir.
- b. Pendidikan yang dihitung berdasarkan tingkat rata-rata melek huruf dikalangan penduduk dewasa (bobotnya dua pertiga) dan angka rata-rata lama sekolah (bobotnya sepertiga).
- c. Kualitas standar hidup yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli dari mata uang domestic dimasing-masing Negara.⁷⁰

IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan standar hidup yang diukur dengan konsumsi per kapita. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100. IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari

⁷⁰Todoro, M. P. & Semith, S. C 2003 *Economic Develomen, Eighth Edition*. PT.Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan).⁷¹

Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Sebagai contoh, IPM tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti misalnya ketidak setaraan dan sulit mengukur indikator-indikator seperti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik. Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan.⁷² Berikut adalah rumus penghitungan Indeks Pembangunan Manusia menurut suharto:⁷³

$$IPM = 1/3 (X (1) + X (2) + X (3))$$

Dimana :

X (1): Indeks harapan hidup

X (2): Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata)

X (3): Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai

⁷¹ Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung Refika Aditama, 2010

⁷² UNDP. *Human Right and Human Development*. Human Development Reports 2000. New York: Oxford University Press, 2000

⁷³ *Ibid*, h. 70

maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i) = (X(i) - X(i) \text{ min}) / (X(i) \text{ maks} - X(i) \text{ min})$$

Dimana:

$X(i)$: Indikator ke- i ($i = 1, 2, 3$)

$X(i) \text{ maks}$: Nilai maksimum $X(i)$

$X(i) \text{ min}$: Nilai minimum $X(i)$

Indikator IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *Purchasing Power Parity Index* (PPP). IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari satu daerah/negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan status standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pengeluaran per kapita.⁷⁴

Secara lebih lengkap, tiga dimensi pembangunan manusia diperlihatkan pada Gambar 3, yaitu (1) Dimensi ekonomi yang diwujudkan oleh kehidupan yang layak dan diukur dengan indikator pengetahuan per kapita riil; (2) Dimensi sosial,

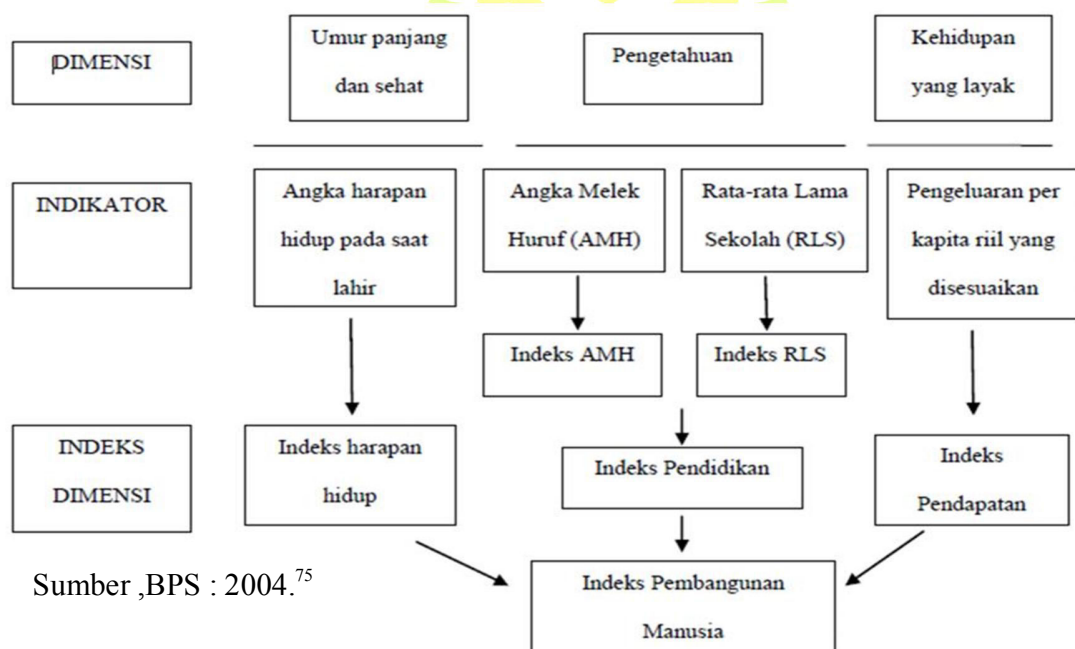
⁷⁴ BPS. 2000-2015. *Lampung Dalam Angka*, beberapa terbitan, BPS Provinsi Lampung Lampung.

diwujudkan oleh tingkat pengetahuan dan diukur oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; (3) Dimensi kesehatan, perwujudannya adalah umur panjang dan sehat dengan indikator yaitu angka harapan hidup saat lahir. Angka harapan hidup ketika lahir merupakan suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk yang dilahirkan pada tahun tersebut. Angka Harapan Hidup ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur indikator kesehatan.

Semakin tinggi Angka Harapan Hidup (AHH) suatu masyarakat mengindikasikan tingginya derajat kesehatan masyarakat tersebut.

Gambaran umum Indeks Pembangunan Manusia :

Gambar 1. Gambaran umum Indeks Pembangunan Manusia



2. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

⁷⁵ Ibid, hal 6

Perubahan dalam IPM dipengaruhi oleh tiga indikator, yaitu: indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks daya beli. Oleh karena itu, perubahan dalam IPM terkait erat dengan perubahan ketiga indeks tersebut. Terdapat Nilai maksimum dan minimum dari indikator-indikator IPM yang diperlihatkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Maksimum dan Nilai Minimum IPM

Indikator IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Angka Harapan Hidup	85	2	Sesuai Standar Global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai Standar Global (UNDP)
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai Standar Global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disertakan	732,720	300,000	UNDP menggunakan PPP per kapita riil yang Disesuaikan

Sumber: BPS, 2010

Catatan :

- nilai maksimum dikatakan pencapain yang baik apabila menyentuh angka tersebut.
- Apa bila nilai rata-rata tidak menyentuh angka yang di tentukan maka kurang dari standar.

3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.⁷⁶ Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional.

Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN untuk bidang pendidikan.⁷⁷ Hal tersebut tercantum dalam Undang- Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁷⁸ Secara umum anggaran pemerintah dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Berdasarkan struktur anggaran yang dipakai sekarang, maka anggaran pemerintah daerah dinamakan anggaran terpilih. Struktur anggaran

⁷⁶ Adi Widodo, dkk, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Juli 2011, Volume 1, Nomor , h. 28

⁷⁷ Muliza, dkk, *s Ibid*, h.54

⁷⁸ Muliza, dkk, *Ibid*,. h. 54

pemerintah, dalam sistem anggaran di Indonesia dikenal dua macam pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk operasionalisasi pemerintah seperti halnya untuk pembayaran gaji pegawai dan lainnya, sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang dikategorikan sebagai pengeluaran untuk investasi pemerintah, diantaranya investasi disektor pendidikan dan kesehatan (publik).

Berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2004 Pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan anggaran adalah suatu tindakan penyeimbangan berbagai kebutuhan.⁷⁹

Kebutuhan di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan di sektor public tersebut pemerintah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan

⁷⁹Bastian, ndra, Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat), 2006

daerahnya sendiri. Sehingga dengan otonomi daerah pemerintah daerah akan semakin mampu mencukupi kebutuhan pembangunannya. Selain memasukkan indeks kesehatan, perhitungan IPM juga memasukkan indeks pendidikan. Indeks pendidikan berbeda dengan indeks kesehatan, karena di dalam indeks pendidikan mengakomodir dua indikator komponen prestasi, yaitu: indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah. Indeks melek huruf dihitung berdasarkan perubahan angka melek huruf, sedangkan indeks rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan angka rata-rata lama sekolah.

Rumusan yang digunakan untuk menghitung indeks pendidikan (IPd) berdasarkan BPS dan UNDP adalah:

Rumus menghitung melek huruf :

$$IMH = \frac{x_t - x_{mi}}{x_{max} - x_{min}}$$



Keterangan :

IMH = indeks melek huruf

X_t = angka melek huruf pada tahun tertentu

X_{min} = angka melek huruf minimum = 0

X_{max} = angka melek huruf maximum = 100

Rumus untuk menghitung indeks rata-rata lama sekolah :

$$ILS = \frac{(X_t - X_{min})}{X_{max} - X_{min}}$$

Keterangan:

ILS = Indeks rata-rata Lama Sekolah

X_t = Angka Indeks rata-rata Lama Sekolah pada tahun tertentu

X_{min} = Angka Indeks rata-rata Lama Sekolah minimum = 0

X_{max} = Angka Indeks rata-rata Lama Sekolah maksimum = 15



IMH = Indeks Melek Huruf

ILS = Indeks Rata-Rata Lama Sekolah

2/3 = Bobot IMH yang ditetapkan secara arbitrer oleh UNDP

1/3 = Bobot ILS yang ditetapkan secara arbitrer oleh UNDP

⁸⁰ *Ibid.* hal 64

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun keatas.

Keterangan:

IMH = Indeks Melek Huruf

X_t = Angka Melek Huruf pada tahun tertentu

X_{\min} = Angka Melek Huruf minimum = 0

X_{\max} = Angka Melek Huruf maksimum = 100

4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Dalam UUD 1945 disebutkan kesehatan merupakan hak dasar (azasi) manusia, sehingga pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan perlindungan dan fasilitasi kesehatan kepada rakyatnya. Apalagi dalam tujuan pembangunan nasional telah disebutkan setiap penduduk berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Maka wajar jika kesehatan dapat disebut sebagai investasi pemerintah pada belanja/pengeluaran pembangunan untuk pengembangan sumber daya manusia.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁸¹ Melihat mutu manusia dari sisi lain yaitu dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, atau pun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah indikator harapan hidup (indeks kesehatan).

Dalam perhitungan yang digunakan indeks kesehatan, digunakan angka harapan hidup sebagai indikator.⁸²

Keterangan:

$$IPM = \frac{1}{3} (IHH + IPD + IP)$$

IHH = Indeks Harapan Hidup

X_t = Angka Harapan Hidup pada tahun tertentu

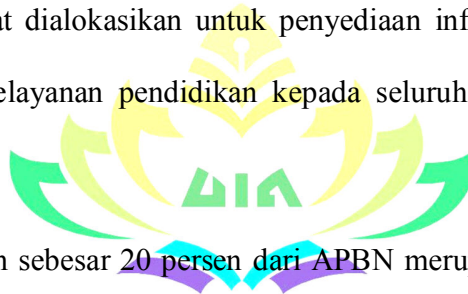
⁸¹ Tjiptoherijanto, Prijono, *Untaian Pembangunan Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: FEUI, 1998)

⁸² *Ibid.* h. 62

X_{\min} = Angka Harapan Hidup minimum = 25

C. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan dan Kesehatan) dengan IPM

Secara garis besar kaitan pengeluaran pemerintah dalam hal Investasi pendidikan dan kesehatan mutlak dibutuhkan, maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata.



Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa.

Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan. Anggaran pendidikan sebesar 10 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang maka pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Dilihat dari pemaparan di atas bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan IPM dengan melalui kualitas masyarakat yang baik dari potensi yang ada pada manusia dilihat dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan nilai ketahanan hidup gizi Dan lain-lain. Semua ini adalah campur tangan pemerintah dalam mengelola pengeluaran pemerintah (belanja) mengolahkannya dengan baik. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan

menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada IPM..⁸³

D. Pembanguna Sumber Daya Insani (SDI) Dalam Perspektif Ekonomi

Islam

Pembangunan manusia dan kesejahteraan manusia memiliki tempat penting dalam konsep pembangunan Islam. Mayoritas ulama Islam sampai pada kesimpulan bahwa tujuan dari Syariah (Maqasid al-Shariah) adalah untuk mempromosikan kesejahteraan seluruh umat manusia, yang terletak dalam menjaga iman, diri mereka, kecerdasan mereka, keturunan mereka dan kekayaan mereka. Sehingga, perkembangan manusia dalam perspektif Islam harus didasarkan pada Maqasid al-Shariah.

Adapun yang dimaksud dengan sumber daya insan adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.⁸⁴ Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo pembangunan sumber daya insani, secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa. Secara mikro, dalam arti di lingkungan suatu unit kerja

⁸³*Ibid*, h. 22

⁸⁴Sadono Sukirno, dkk, Pengantar Bisnis, cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 173

(departemen atau lembaga-lembaga yang lain), maka sumber daya yang dimaksud adalah tenaga kerja, pegawai atau karyawan (employee).

Maka yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimal.⁸⁵ Pengembangan SDI merupakan Modal manusia sebagai aset tidak berwujud. Namun, ini adalah sumber daya yang paling penting dibandingkan dengan sumber daya berwujud lainnya. Hal ini karena tanpa sumber daya manusia, sumber daya yang nyata tidak dapat dimanfaatkan dalam rangka mencapai visi, misi, menetapkan tujuan dan fungsi yang diharapkan.

Dari pengertian diatas dapat kita ambil makna bahwa sumber daya insani memegang peranan penting dalam kemajuan ekonomi islam di Indonesia dewasa ini. Pertumbuhan ekonomi islam yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, menandakan bahwa peran serta sumber daya manusia yang berkecimpung dalam perekonomian islami ini sudah memainkan perannya dengan sangat baik. Sumber Daya Insani dalam islam merupakan potensi dan kemampuan yang dapat didayagunakan untuk dapat meraih Ridha Allah SWT, yakni kemenangan atau kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat yang dengan kata lain sosok dan peranan sumber daya manusia dalam perekonomian islam sangatlah jauh berbeda dengan perekonomian konvensional pada umumnya.

⁸⁵Jusmaliani. 2011, Pengelolaan Sumber Daya Insani,(Jakarta: Bumi Aksara, h. 12)

Sumber daya insani dalam perekonomian islam sudah memiliki aturan yang jelas dan tegas dalam mengelola perekonomian islam yang bertolak dari paradigma, azas dan karakteristik entitas perekonomian islam yang acuannya berupa sumber utama agama islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist, yang tentunya jauh berbeda dengan pengertian sumber daya insani dalam konsep umum yang hanya bertujuan dalam kenyamanan duniawi dengan mengabaikan faktor akhirat. Perbedaan yang mendasar antara perekonomian islam dengan perekonomian konvensional dalam hal pengelolaan dan penerapan berakibat pada perbedaan kebutuhan sumber daya insani yang di butuhkan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem ekonomi islam.

Kriteria-kriteria khusus mutlak di syaratkan agar penerapan ekonomi islam sesuai dengan yang sudah digariskan agar tujuan dari penerapan ekonomi islam dapat tercapai.⁸⁶ Tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan sumber daya insani sebagai menjadi 3 faktor yang utama di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan dan di bidang perekonomian. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dalam kegiatan pembangunan, karena tanpa adanya pendidikan maka tidaklah mungkin dapat terjadi kemajuan pembangunan.

Hal ini bisa kita lihat pada negara-negara maju bahwa kemajuan yang dicapai tidak lain adalah karena kemampuan sumber daya insani yang mumpuni. Kemajuan seperti bidang teknologi, industri dan lain sebagainya merupakan hasil dari

⁸⁶*Ibid*, h 31

kecerdasan, kreativitas, dan inovasi dari sumber daya insani yang berkompetensi tinggi. Kecakapan yang dimiliki dapat memungkinkan mereka mengolah sumber daya alam yang ada dengan baik sehingga kesejahteraan dapat tercapai.⁸⁷

Kemampuan tersebut dapat dikembangkan yaitu melalui pendidikan dengan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang kemudian dapat mengarahkan kepada sumber daya manusia yang profesional dan produktif. Semakin produktif sumber daya manusia yang ada tentu saja akan semakin menunjang dalam peningkatan penghasilan. Itu sebabnya peran pendidikan sangatlah penting dan tidak bisa diabaikan demi kemajuan pembangunan suatu bangsa.

Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan untuk pengembangan potensi sumber daya manusia yakni meliputi kegiatan peningkatan pengetahuan, kemampuan penalaran, pengembangan karakter serta peningkatan keterampilan baik melalui pendidikan formal umum/kejuruan maupun melalui pendidikan informal seperti kegiatan berupa pelatihan.⁸⁸ Pengadaan kegiatan-kegiatan pendidikan tersebut akan dapat dilaksanakan dengan adanya dukungan dari pemerintah baik abntuan, fasilitas dan sarana prasarana. Kewajiban pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di bidang pendidikan ini berlandaskan pada pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sudah menjadi hak bagi masyarakat untuk mendapat pengajaran seperti yang tercantum dalam batang tubuh yakni Pasal

⁸⁷*Ibid*, h46

⁸⁸*Ibid*, h. 66

31 ayat 1 UUD 1945. Selain pendidikan, aspek kesehatan juga tidak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terpenuhinya kebutuhan fisik akan kesehatan tentu akan memperlancar individu dalam melakukan aktivitas/pekerjaannya dengan baik, sehingga kemungkinan menambah penghasilan pun dapat dicapai. Sangatlah penting untuk memperhatikan tingkat kesehatan suatu penduduk demi tercapainya produktivitas kerja yang tinggi sehingga kehidupan yang makmur sebagai tujuan pembangunan dapat terwujud. Upaya peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan oleh pemerintah seperti melalui pengadaan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan yang memadai.

Kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan harus didukung secara baik agar peningkatan kualitas kesehatan penduduk dapat terjamin terutama bagi masyarakat miskin. Tingkat kesehatan yang baik dapat dilihat diantaranya dari angka kematian bayi dan balita, serta angka kematian ibu melahirkan, karena semakin tinggi angka kematian mencerminkan tingkat harapan hidup yang buruk sehingga dapat dikatakan kualitas kesehatan yang seperti itu adalah rendah. Kemudian sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menangani hal tersebut agar kesejahteraan penduduk dari segi kesehatan pun akan terjamin.

Tingkat kesejahteraan penduduk salah satunya dapat dinilai dari segi ekonominya, yaitu meliputi tingkat pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran.

Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu penduduk, rendahnya tingkat kemiskinan serta rendahnya tingkat pengangguran maka kesejahteraan ekonomi penduduk itu sendiri juga akan semakin baik. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah sudah seharusnya menjamin kemudahan bagi penduduk dalam hal memperoleh kesempatan kerja dengan melalui perluasan lapangan kerja ataupun bantuan bagi penduduk tidak mampu untuk memperoleh nafkah dan kehidupan yang layak.

Kewajiban ini tercantum dalam batang tubuh yakni Pasal 27 ayat 2 serta Pasal 34 UUD 1945. Meningkatnya kesempatan kerja sudah barang tentu akan menaikkan tingkat partisipasi kerja dan mengurangi pengangguran yang kemudian tingkat pendapatan juga akan meningkat sehingga kemiskinan secara otomatis akan turut menurun. Selain itu, bantuan terhadap penduduk tidak mampu termasuk golongan fakir miskin akan mampu menaikkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sehingga akan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Dalam hal ini peran pemerintah sesuai perannya yakni memberikan kemudahan akses bagi pemenuhan kebutuhan hidup layak oleh masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja dan program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan tunai yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu seperti yang dikemukakan oleh Pasal 27 ayat 2 serta Pasal 34 UUD 1945 guna menunjang kualitas ekonomi masyarakat.⁸⁹ Sumber daya insani dalam perekonomian islam wajib bertanggung jawab dalam

⁸⁹*Ibid*, h. 86

menjaga kemurnian ekonomi islam agar tetap berada dalam fungsi sebagai sistem ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan keseimbangan. Manusia yang berkepentingan dalam perekonomian islam harus sungguh-sungguh dalam memaknai bahwa sistem ekonomi islam memiliki keterikatan di setiap hal-hal yang terkait, mulai dari subjek sampai dengan objek ekonomi islam itu sendiri.

Selain itu, sumber daya insani juga harus turut andil dalam mengembangkan ekonomi islam dengan cara terus mengembangkan potensi serta kapasitas diri sehingga dapat menjadi bagian dari pemicu perbaikan perkembangan ekonomi islam secara berkesinambungan. Lembaga pendidikan juga harus turut ambil bagian dalam menyediakan wadah untuk mengembangkan potensi bagi sumber daya manusia sehingga antara kebutuhan akan fasilitas pengembang potensi dengan penyediaan layanan pendidikan terfasilitasi secara seimbang. Kerja merupakan kunci untuk memanfaatkan sumber daya alam. Pada dasarnya, tak ada kerja berarti tak ada pendapatan.

Dalam Islam, orang yang bekerja keras mencari nafkah adalah setara dengan orang yang berjuang di jalan Allah bertujuan untuk memperkuat basis integritas dan moralitas manusia dan memasyarakatkan keadilan sosial. Akan tetapi malas-malasan dan menganggur merupakan tindakan dan keadaan yang dibenci oleh Allah. Orang mukmin kuat lebih disukai oleh Allah. Ibnu Taimiyah menyebutkan mukmin yang kuat. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang aktif dalam hidup di dunia ini.

Etos yang dominan dalam Islam adalah menggarap kehidupan ini secara giat, dengan mengarahkannya kepada yang lebih baik (ishlah). Namun Yusuf al-Qardhawi mengingatkan bahwa dalam Islam sosok individu yang dikehendaki Allah Swt setelah menjadi kaya atau kuat dalam beberapa segi kehidupannya adalah yang dermawan dan murah hati.⁹⁰ Namun bagi Islam, faktor manusia lah yang lebih berperan dalam sebuah pembangunan. Todaro tepat menempatkan dalam kata-kata berikut:

"Pembangunan karena itu harus dipahami sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer, dan lembaga-lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan pada intinya, harus mewakili seluruh perubahan dimana suatu sistem sosial secara keseluruhan, sesuai untuk kebutuhan dasar yang beragam dan keinginan individu dan kelompok sosial dalam sistem itu, bergerak menjauh dari kondisi kehidupan secara luas dianggap sebagai tidak memuaskan terhadap situasi atau kondisi hidup dianggap sebagai material dan spiritual yang lebih baik."⁹¹

Tentu saja yang dimaksud oleh Islam adalah manusia yang berperilaku dengan akhlak Islam, manusia yang bebas dan merdeka, manusia dengan tauhid yang bersih. Semua hal ini dapat dicapai tentu saja melalui tarbiyah insaniyah itu sendiri. Pendidikan yang menyeluruh dan bukan sebagian saja. Sebagai khalifah (wakil) Allah SWT manusia memiliki kewajiban untuk memakmurkan bumi Allah:

⁹⁰Prof.Dr.H. Viethzal Rivai ,MBA, *Islamic Human Capital*, (Jakarta : Rajawali Pers 2009), h.4

⁹¹*Ibid* . h. 37

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ
 نَشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ
 مُجِيبٌ

Artinya :

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurny, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (Hud 61).⁹²

Sebagai wakil, maka segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah SWT. Pemahaman ini mengantarkan manusia menunaikan hak-hak Allah sebagai pemilik utama dalam bentuk kebaikan seperti zakat, sedekah dan lain sebagainya. Upaya pembangunan insani itu dapat dimulai dengan peningkatan kemampuan melalui pendidikan.

Ilmu pengetahuan dan Islam dipandang sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan suluh penerang kehidupan sekaligus nafas peradaban. Kemajuan peradaban Islam pada masa Abbasiyah di Irak hingga Andalusia di Spanyol (abad 7 M – 13 M), berkat kemajuan ilmu pengetahuan pada masa itu. Begitu banyak ayat yang membicarakan akan keutamaan ilmu.

⁹² Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), QS : Hud: 61

Artinya:.....apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (az-zumar; 9).⁹³

Pembangunan yang berdasarkan konsep Robbani. Konsep yang tidak hanya terpaku kepada pembangunan aspek keduniaan dan materi saja, tetapi juga aspek ruhiyah dan akhirat. Islam tidak pernah memisahkan keduanya. Konsep yang mengajak kepada keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu tanpa melupakan kepentingan bersama.

Keseimbangan dan keselarasan antara ruh dan jasad, antara ilmu dan akhlak, akan melahirkan keberkahan yang dijanjikan Allah SWT dalam firman Nya:

⁹³*Ibid*, h. 412

ج
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ فَتُضَى بَيْنَهُمْ
يَا لِحَقِّ قِيلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

Artinya :

Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.(az-zumar 96).⁹⁴

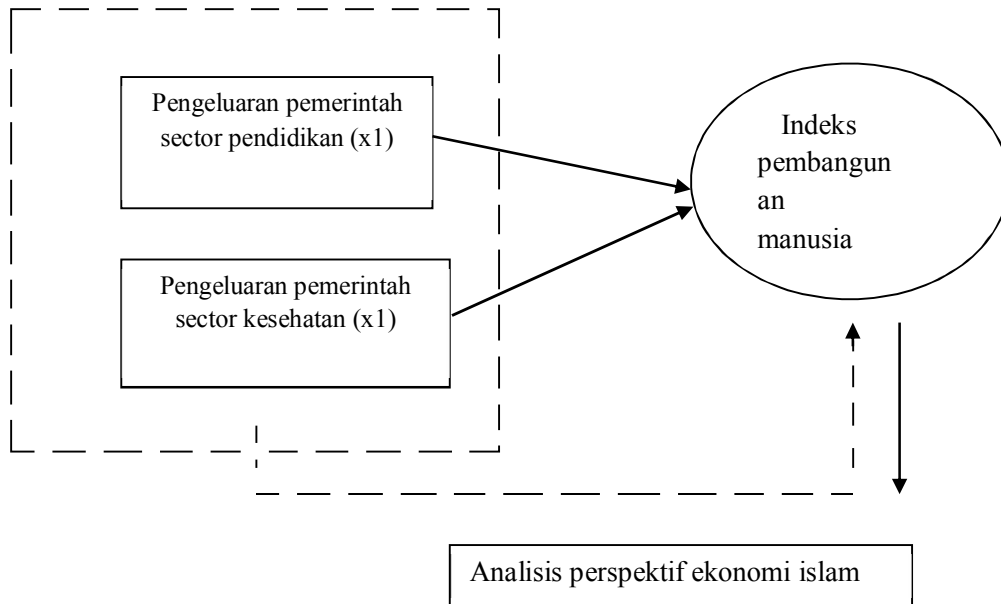
E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁹⁵ Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah sector pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia provinsi Lampung dalam prespektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini model hubungan antara variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah sector pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sector kesehatan (X_2), indeks pembangunan manusia (Y) adapun kerangka berfikir yang digunakan dalam skripsi ini digambarkan dalam diagram berikut:

⁹⁴ *Ibid*, h. 237

⁹⁵ *Ibid*, h. 60

Gambar 2. Kerangka Pemikiran



Sumber : Dikembangkan untuk penelitian ini 2018

Kerangka pemikiran di atas dimaksudkan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan keterkaitan antara pengeluaran pemerintah sector pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sector kesehatan (X_2), indeks pembangunan manusia (Y).

F. Penelitian Terdahulu

Bagiann ini akan menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang di lakukan sebelumnya dan akan menjadi landasan berfikir penulis, untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan sekripsi ini, penelitian terdahulu berhasil dipilih untuk dikedepankan yang di jelaskan seebagai berikut :

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No. Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Jenis data dan alat Analisis	Hasil Penelitian
1. Prayudha Ananta (2013)	Determinan Pemba Manusia Provinsi Lampung	IPM, PDRB per kapita, Pengeluaran Pemerintah Fungsi pendidikan, Dan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan	Data sekunder / Uji regresi data panel pendidikan, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan kabupaten/kota bersama-sama terhadap kabupaten/kota	Secara bersama-sama variabel PDRB per kapita, variabel pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, dan variabel pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan tiap kabupaten/kota secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel IPM tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
2. Devianti Patta (2012)	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruh Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan	IPM, Pertumbuhan ekonomi, Tingkat kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Bidang pendidikan,	Data sekunder / Time series, (<i>Ordinary</i> <i>Least Square</i>), Regresi Linear	1). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Sulawesi Selatan 2). Persentase penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap IPM di Sulawesi Selatan. 3). Pengeluaran pemerintah

	Periode 2001-2010	Pengeluaran Pemerintah	Berganda	bidang pendidikan dan kesehatan
		Bidang kesehatan		pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan
		Ketimpangan Distribusi Pendapatan		aruh positif dan signifikan , IPM di Sulawesi Selatan. 4). Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Sulawesi Selatan.
3.	Citra Afnovinsa Putri (2014)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan	IPM, Pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan, Sektor Pendidikan dan jumlah Penduduk Miskin Berganda	Data sekunder / Time series, (Ordinary Least Square), Regresi Linear Berganda
				1). Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan secara parsial dan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung. 2). Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan secara parsial dan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung. 3). Jumlah penduduk miskin secara parsial dan bersama-
		Manusia Provinsi Lampung		sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.

periode 2003-
2012

4

Denni Sulistio Mirza (2012)	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009	IPM, kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal	Data sekunder / Uji data panel yaitu <i>time series</i> dan <i>cross Section</i>	1).Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. 2).Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. 3).Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
-----------------------------	--	---	--	---

5

Christina Usmalıad Anti (2011)	Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap IPM Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009	IPM, kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Fungsi pendidikan, Dan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan	Data sekunder / Uji regresi data panel	1). Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. 2). Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. 3). Jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.
--------------------------------	---	--	--	--

Adi Dwi Putra (2015)	Analisis	IPM,	Data	1). Pengangguran Terbuka
	Pengaruh	Tingkat	sekunder /	berpengaruh negatif dan
	Tingkat	Penganggura	Time	signifikan terhadap IPM di
	Pengangguran	n terbuka,	series,	Provinsi Lampung.
	Terbuka,	Pertumbuhan	OLS	2). Pertumbuhan Ekonomi
	Pertumbuhan	ekonomi,	(<i>Ordinary</i>	berpengaruh positif dan
	Ekonomi,	Pengeluaran	<i>Least</i>	signifikan terhadap IPM di
	Pengeluaran	Pemerintah	<i>Square</i>),	Provinsi Lampung.
	Pemerintah	Sektor	Regresi	3). Pengeluaran Pemerintah
	Sektor	Pendidikan	Linear	Sektor Pendidikan
dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.	Pendidikan	Dan	Berganda	berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM
	Pengeluaran	Pemerintah		Provinsi Lampung.
	Sektor	Kesehatan		4). Pengeluaran Pemerintah
	Pembangunan			Sektor Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.

perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah tahun yang tertera pada penelitian ini pada tahun 2009-2016 yang mana penelitian tertuju di Provinsi Lampung untuk mempermudah penelitian peneliti, perbedaan lainnya adalah variable x3 yang merupakan Indeks Pembangunan Indonesia yang di tinjau dalam perspektif ekonomi islam.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.⁹⁶ Hipotesis digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata.

Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa.

⁹⁶*Ibid*, h. 64

Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan.

H_0 : pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung pada tahun 2009-2016.

H_1 : pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung pada tahun 2009-2016.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap IPM

Todaro & Smith berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.⁹⁷ Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Menurut Tjiptoherijanto, dalam Astri melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia.

Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, Undang-undang di

⁹⁷ *Ibid*, h. 83

Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.⁹⁸

H_0 : pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung pada tahun 2009-2016

H_2 : pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung pada tahun 2009-2016.


3. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap IPM

Seperti yang telah di paparkan di atas bahwa pengeluaran sektor pendidikan dan sektor kesehatan memiliki peranan penting dalam Indeks Pembangunan Manusia di karenakan pendidikan dan kesehatan merupakan suatu tolak ukur bagaimana berkembang atau tidak nya masyarakat di suatu Negara tersebut sebagaimana Tingkat pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap IPM, dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan maka akan diikuti oleh perubahan IPM. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan di Indonesia hanya berkisar

⁹⁸ Mudrajat, Kuncoro. 2013, *Indikator Ekonomi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta

1 persen dari PDB, sedangkan pengeluaran swasta kurang dari 2 persen. Padahal, WHO memberikan batasan pengeluaran kesehatan setiap negara minimal 5 persen dari PDB. Oleh karena tingkat pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan belum mencapai 5 persen dari PDRB, maka pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan di Provinsi Lampung masih sangat rendah dibandingkan dengan tingkat pengeluaran pemerintah lainnya. Tingkat pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan secara serempak memberikan pengaruh dengan ditunjukkan koefisien pada dua variabel bebas tersebut, sehingga tetap memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IPM, meskipun dengan tingkat pengaruh yang rendah.


 H_0 : tidak terdapat pengaruh signifikan positif antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung pada tahun 2009-2016

H_3 : terdapat pengaruh signifikan positif antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung pada tahun 2009-2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁹⁹ Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*).

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur(kepustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan dan indeks pembangunan manusia, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Direktorat Jenderal Perimbangan

⁹⁹Sugiyono, *Op.Cit* , h.11

Keuangan (DJPK), maupun sumber data sekunder lainnya. Data berupa data *time series* Tahun 2009 hingga Tahun 2016, serta data dari jurnal dan artikel.¹⁰⁰

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Asosiatif* (Hubungan) , yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variabel bebas yaitu Pengeluaran Pemerintah dan pengaruhnya terhadap IPM. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibangun teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data Kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/*scoring*.¹⁰¹ Data-data kuantitatif dalam penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, sector pendidikan dan kesehatan, dan Indeks pembangunan Manusia Provinsi Lampung baik secara simultan maupun parsial ditinjau dalam persepektif ekonomi islam.

¹⁰⁰Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.5

¹⁰¹Sugiyono, *Op.Cit*,h. 6

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolanya tetapi dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu.¹⁰² Data sekunder berasal dari sumber internal maupun eksternal. Dalam hal ini, data sekunder yang bersifat internal didapat melalui data-data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yaitu data Indeks Pembangunan Manusia 2009-2016 berupa data runtut waktu (*time series*) dan yang bersifat eksternal didapat melalui sumber-sumber di luar instansi yang dipublikasikan dan juga jurnal, artikel, Al-Qur'an, Al- Hadis dan internet. Dalam hal ini yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.



C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu:

1. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau

¹⁰² *Ibid*, h.138

data yang mendukung penelitian, seperti data IPM Provinsi Lampung dari tahun 2009-2016, yang diperoleh Badan pusat statistic (BPS) Provinsi Lampung.

2. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada, Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰³ Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu data IPM Provinsi Lampung berdiri yang telah di publikasikan. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.¹⁰⁴

¹⁰³*Ibid*, h. 119

¹⁰⁴*Ibid*, h.126

Dalam penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu data IPM pada tahun 2009-2016 yang telah tersusun dalam bentuk angka yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Lampung. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.¹⁰⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan sampel sepuluh tahun terakhir yaitu tahun 2009-2016.

E. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia data yang akan diteliti adalah data IPM yang diperoleh dan tersedia dari Badan Pusat statistik (BPS) Provinsi Lampung yang diambil dari tahun 2009-2016.

2. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel devenden (terikat). Variabel indevenden dalam

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 120

penelitian ini adalah data IPM yang diperoleh dari BPS Provinsi Lampung. Skala Pengukuran Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Rasio. Dimana Skala Rasio merupakan skala interval dan memiliki nilai dasar (*based value*) yang tidak dapat dirubah. Data yang dihasilkan dari skala rasio disebut data rasio dan tidak ada pembatasan terhadap alat uji statistik yang sesuai. Variabel yang diukur dengan skala rasio disebut variabel metrik.¹⁰⁶ Sehingga skala pengukuran variabel yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah rasio Rupiah (Rp) dan persentase (%).

Table 4. Daftar Operasional Variabel

Variable	Definisi	Satuan pengukuran variable	Sumber Data
Pengeluaran sector pendidikan	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan merupakan alokasi dana APBN/APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang pendidikan.	Rupiah (Rp)	DJPK (DIREKTORAT JENDEAL PERTIMBANGAN KEUANGAN KEMENTRIAN KEUANGAN)
Pengeluaran sector kesehatan	Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan alokasi dana APBN/APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang kesehatan.	Rupiah (Rp)	DJPK (DIREKTORAT JENDEAL PERTIMBANGA N KEUANGAN KEMENTRIAN KEUANGAN)
Indeks pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dasar, yaitu indeks harapan hidup	Rasio (Indeks)	BPS (BADAN PUSAT

¹⁰⁶Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 1* (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h.5

	(IHH), indeks pendidikan (IPd), dan indeks pendapatan (IP).		STATISTIK)
--	--	--	------------

F. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit ditarik generalisasi yang mempunyai sifat khusus. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, regresi merupakan teknik statistik (alat analisis) hubungan yang digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan dari satu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain melalui persamaan garis regresi.

Analisis regresi biasa berupa garis lurus (linier) dan non linier. Sementara analisis regresi pada penelitian ini adalah regresi linier berganda, yaitu regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X) yaitu Pengeluaran sektor pendidikan, Pengeluaran sektor kesehatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y).

1. Uji Asumsi Klasik

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah di dalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat

(Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi.

Apabila data regresi sudah melewati empat masalah dalam uji asumsi klasik maka data dapat dikatakan lulus uji asumsi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kolmogrovsmirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji *kolmogrovsmirnov* adalah uji beda antara data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku.

- 1) Jika $\text{Sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal
- 2) Jika $\text{Sig} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.¹⁰⁷

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dimaksudkan apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (*independent*). Apabila terjadi kolerasi antara variabel

¹⁰⁷ V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Pers, 2015), h. 52-56

bebas, maka terdapat problem multikolineritas (multiko) pada model regresi tersebut. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolineritas adalah koefisien korelasi antar variabel *independent* haruslah lemah dibawah 0,05. Jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolineritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu penelitian. Uji autokorelasi ini menggunakan Run-Test. Run-Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *white heteroscedasticity-consistent standart errors and covariance heteroskedastisicity*. Untuk uji white menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut :

- 1) H_0 : Obs*R square (χ^2 -hitung) > Chi-square (χ^2 -tabel), $p\text{-value} < 5\%$,
artinya model regresi mengalami masalah heteroskedastisitas.
- 2) H_a : Obs*R square (χ^2 -hitung) < Chi-square (χ^2 -tabel), $p\text{-value} > 5\%$,
artinya model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

2. Uji Hipotesis

a. Uji F atau Uji Simultan

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS 21 berikut:

- 1) Jika probabilitas < 0,05 maka H_0 ditolak.
- 2) Jika probabilitas > 0,05 maka H_0 diterima.

b. Uji t atau Uji Parsial

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing variabel independen yang terdiri atas Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan variabel dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan

keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS 21 sebagai berikut:

- 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

3. Koefisien Determinasi

Pada model linier berganda ini akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R^2). Jika determinasi totalnya (R^2) yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika determinasi totalnya (R^2) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.¹⁰⁸

4. Regresi Linear Berganda

Untuk alat uji Hipotesis peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya

¹⁰⁸Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung : PT. Tarsito, 2009), h.373

hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).¹⁰⁹

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Terikat, yaitu variabel IPM

X₁ = Variabel bebas yaitu Sektor Pendidikan

X₂ = Variabel bebas yaitu Sektor Kesehatan

B_{1,2} = Koefisien Regresi

a = Konstanta

e = Error



¹⁰⁹Usman, Husaini dan Setiadi, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 241

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung berdiri pada tanggal 18 Maret 1964 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-undang No 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan karisidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Lampung adalah Provinsi yang paling strategis karena Provinsi Lampung menjadi pintu gerbang masuk ke Pulau Sumatera untuk dapat menuju ke provinsi-provinsi lainnya.⁶⁷

Visi Provinsi Lampung adalah : “Lampung Maju dan Sejahtera 2019” . Sedangkan Misi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah
 2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial
 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama.
- Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

⁶⁷<http://lampungprov.go.id/page/detail/sejarah-lampung.html>. Diakses pada Hari Kamis, 26 Januari 2017, Jam 19:45

- Transformasi Budaya Lampung dan Pemantapan Toleransi Kehidupan Beragama
4. Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.
 5. Menegakkan Supremasi Hukum, Membangun Peradaban Demokrasi dan Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme ASN.⁶⁸

Secara geografis, Provinsi Lampung terletak pada 103°40' sampai 105°50' Bujur Timur dan 6°45' sampai 3°45' Lintang Selatan, disebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, sebelah Selatan dengan Selat Sunda, sebelah Timur dengan Laut Jawa dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Daerah Lampung memiliki luas dataran 35.288,35 Km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera, dan dibatasi oleh :

1. Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara
2. Selat sunda di sebelah selatan
3. Laut Jawa di sebelah Timur
4. Samudera Indonesia di sebelah Barat

⁶⁸ <http://lampungprov.go.id/page/detail/visi-misi-provinsi-lampung.html>, diakses pada Hari Rabu, 9 oktober 2018, Jam 12:08

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan kota kembar Tanjung Karang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti pasar ikan (Teluk Betung), Tarahan, Kalianda di Teluk Lampung, sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung, dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuan Maringgai dan Ketapang. Disamping itu, kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudera Hindia terdapat Pelabuhan Krui.

Lapangan terbang utamanya adalah “Raden Inten II”, yaitu nama baru dari “Branti” 28 km dari ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan lapangan terbang AURI terdapat di Menggala bernama Astra Ksetra. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan:

- Timur – Barat berada antara : $103^{\circ} 40'$ – $105^{\circ} 50'$ Bujur Timur
- Utara – Selatan berada antara : $6^{\circ} 45'$ - $3^{\circ} 45'$ Lintang Selatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukota Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 18 Maret 1964. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 ibukota Tanjungkarang-Telukbetung diganti namanya menjadi Kotamadya Bandarlampung terhitung sejak tanggal 17 Juni

1983. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) kabupaten/kota , dengan luas masing-masing kab/kota sebagai berikut:

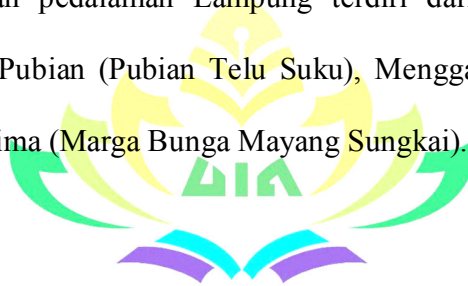
Tabel 5. Data BPS Kabupaten/Kota

No	Kabupaten	Ibukota	Luas wilayah	Jumlah Kecamatan
1.	Lampung Barat	Liwa	2.142,78 Km ²	15
2.	Tanggamus	Kota Agung	3.020,64 Km ²	20
3.	Lampung Selatan	Kalianda	700,32 Km ²	17
4.	Lampung Timur	Sukadana	5.325,03 Km ²	24
5.	Lampung Tengah	Gunung Sugih	3.802,68 Km ²	28
6.	Lampung Utara	Kotabumi	2.725,87 Km ²	23
7.	Waykanan	Blambangan Umpu	3.921,63 Km ²	14
8.	Tulang Bawang	Menggala	3.466,32 Km ²	15
9.	Pesawaran	Gedong Tataan	2.243,51 Km ²	11
10.	Pringsewu	Pringsewu	625,00 Km ²	9
11.	Mesuji	Mesuji	3.921,63 Km ²	7
12.	Tulang Bawang Barat	Panaragan Jaya	1.201,00 Km ²	8
13.	Pesisir Barat	Krui	2.907,23 Km ²	11
14.	Bandar Lampung	-	296 Km ²	20
15.	Metro	-	61,79 Km ²	5

Secara *Geologi* punggung sebelah barat Lampung adalah bagian dari Bukit Barisan yang merupakan *Geantiklinal* dengan *Sinklinal* yang terdapat disebelah timurnya. Lapisan sedimen di sebelah timur ini umumnya tertutup juga oleh

endapan tuffa massam sebagian hasil dari debu gunung api di Bukit Barisan yang membentuk dataran Peneplain di bagian timur Lampung. Dari literatur dan peta Geologi daerah Lampung dapat diinventarisir adanya bahan-bahan tambang yaitu diantaranya minyak bumi, uranium, batubara muda, mineral besi, emas dan perak, marmer, sumber air panas dan gas bumi.

Secara umum, adat masyarakat Lampung dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat adat Saibatin yang berkediaman di sepanjang pesisir termasuk adat Krui, Ranau Komering, sampai Kayu Agung, dan adat Pepadun yang berkediaman di daerah pedalaman Lampung terdiri dari masyarakat Abung (Abung Siwo Migo), Pubian (Pubian Telu Suku), Menggala / Tulang Bawang (Migo Pak) dan BuaiLima (Marga Bunga Mayang Sungkai).



B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam model memiliki distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kolmogorovsmirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan.

- 1) Jika $\text{Sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika $\text{Sig} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada Tabel. 6.

Tabel 6. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogroff-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		8
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,66862631
Most Extreme Differences	Absolute	0,161
	Positive	0,161
	Negative	-0,143
Kolmogorov-Smirnov Z		0,455
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,986

Berdasarkan Tabel 6 nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,455 dan tidak signifikan pada 0,05 (karena $p = 0,986$). Jadi tidak dapat menolak H_0 yang mengatakan bahwa residual terdistribusi secara normal atau dengan kata lain residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dimaksudkan apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (*independent*). Uji ini dilakukan apakah terdapat masalah. Hasil Uji Multikolineritas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Uji Multikolineritas

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	60,545	1,101		54,998	,000		
Pendidikan	0,0000000007097	,000	,745	4,770	,005	,937	1,067
Kesehatan	0,0000000001031	,000	,417	2,668	,004	,937	1,067

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan Tolerance menunjukkan bahwa tidak ada variable independen yang kurang dari 0,10 ini berarti tidak ada korelasi antar variable independen. Hasil perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variable independen dalam model regresi.

3. Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian maka digunakan Uji Runs Test. Apabila nilai Sig. nya di atas 0,05 maka dapat dikatakan lolos uji Autokolerasi, sedangkan apabila di bawah 0,05 maka tidak lolos uji Autokolerasi. Adapun hasil dari pengolahan data pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Runs Test

Runs Test	
	Unstandardized Residu
Test Value ^a	-.06723
Cases < Test Value	
Cases >= Test Value	
Total Cases	
Number of Runs	
Z	
Asymp. Sig. (2-tailed)	

a. Median

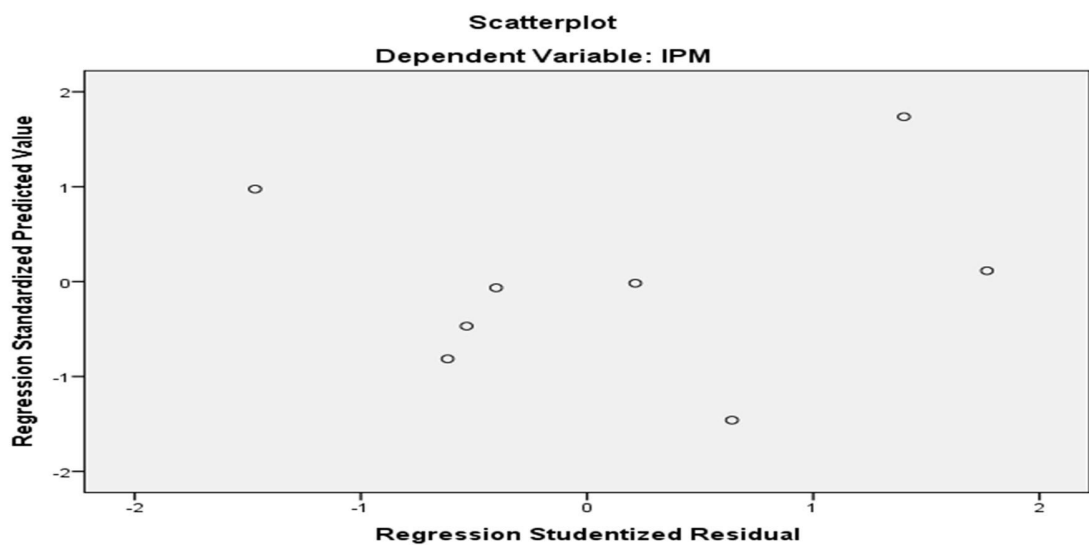
Dilihat dari Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai Test adalah -0,06723 dengan probabilitas 1,000 di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau angka 0, titik-titik data yang tidak mengumpul hanya diatas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar

kembali, hasil penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hasil *output* heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastis



Berdasarkan *outputscatterplot* di atas, terlihat bahwa titik – titik menyebar dan tidak hanya mengumpul di atas atau di bawah serta tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

C. Uji Hipotesis

1. Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Digunakan uji-F statistik pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dengan derajat kebebasan $df_1 = (k-1 = 3-1 = 2)$ dan $df_2 = (n-k = 8-3 = 5)$,

maka diperoleh F-tabel sebesar 3,49. Uji F dalam penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$H : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, diduga secara bersama-sama, paling tidak satu dari variabel bebas (pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.

$H : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, diduga secara bersama-sama, paling tidak satu dari variabel bebas (pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan) berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.

Hasil Uji F dapat dilihat pada Table 9.

Tabel 9. Hasil Uji ANOVA
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	24.223	2	12.111	19.351	.004 ^a
Residual	3.129				
Total	27.352				

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), Kesehatan, Pendidikan

Berdasarkan Tabel 9, diperoleh hasil F-statistik 19,351 dengan signifikansi 0,004 ($0,004 < 0,05$). Karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan yang berarti dapat dikatakan bahwa pengeluaran sector pendidikan dan sector kesehatan bersama-sama berpengaruh terhadap IPM. di Provinsi Lampung.

2. Uji t

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Uji t statistik ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$), dengan derajat kebebasan (df) = $(n-k) = 8 - 3 = 5$.

Hipotesis :

$H_0 : \leq 0$; tidak ada pengaruh positif signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat

$H_a : > 0$; ada pengaruh positif signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat apabila :

- $t_{hitung} > t_{tabel}$: maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel bebas berpengaruh positif signifikan terhadap variabel terikat.
- $t_{hitung} \leq t_{tabel}$: maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel bebas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji t
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	60,545	1,101		54,998	,000
Pendidikan	0,7097	,000	,745	4,770	,005
Kesehatan	0,1031	,000	,417	2,668	,004

Berdasarkan Tabel 10, diperoleh hasil uji t-statistik sebagai berikut:

- a. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki nilai t-statistik (4,770) > t-tabel (2,262) dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian maka secara statistik pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi Lampung.
- b. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki nilai t-statistik (2,668) > t-tabel (2,262) dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian maka secara statistik pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi Lampung.

3. Uji Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi dari model menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil penghitungan regresi yang ditampilkan dapat dilihat koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,886. Hal ini berarti 88,6% perubahan IPM di

Provinsi Lampung dapat dijelaskan oleh variabel penentu dalam model, sedangkan sisanya 11,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Table 11.

Table

111. Hasil Uji	Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
	1	.941	.886	.840	.791	.188

Koefisien Determinasi

- a. Predictors: (Constant), Kesehatan, Pendidikan
- b. Dependent Variable: IPM



4. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	60,545	1,101		54,998	,000
Pendidikan	0,7097	,000	,745	4,770	,005
Kesehatan	0,1031	,000	,417	2,668	,004

Pada prinsipnya model regresi linier merupakan suatu model yang parameternya linier dan secara kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel predictor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sector pendidikan dan kesehatan periode 2009–2016. Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 60,545 + 0,7097X_1 + 0,1031X_2 + e$$

Dimana: a = konstanta = 60,545

X₁ = pengeluaran sektor Pendidikan b₁ = 0,7097

X₂ = pengeluaran sektor Kesehatan b₂ = 0,1031

Koefisien – koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 60,545 menunjukkan jika variable pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sector kesehatan di anggap konstan, maka rata-rata IPM adalah sebesar 60,545.
- b. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier berganda koefisien regresi pada variabel X_1 sektor pendidikan sebesar 0,7097 artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% pada sector pendidikan maka mengalami peningkatan IPM sebesar 0,7097%. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara pengeluaran sector pendidikan.
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier berganda koefisien regresi pada variabel X_2 yaitu sector kesehatan yang bernilai positif sebesar 0,1031 artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% pada sector kesehatan maka mengalami peningkatan IPM sebesar 0,1031 %. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara pengeluaran sector kesehatan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode Regresi Linier Berganda, model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan hasil dan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM

a. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Hasil uji signifikansi parameter menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan bernilai positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar 0,7097 artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% pada sektor pendidikan maka mengalami peningkatan IPM sebesar 0,7097%. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Hal ini sesuai dengan APBN yang pemerintah keluarkan untuk biaya pendidikan sebesar 20% dari anggaran pemerintah. Pada tahun 2009 APBN pemerintah sekitar 1,3 triliun sehingga untuk pendidikan sekitar 27 milyar, pada tahun 2010 pemerintah mendapat anggaran sekitar 500 miliar sehingga untuk biaya pendidikan dari anggaran itu sekitar 11 miliar. Namun pada tahun 2011 pemerintah mendapat anggaran sekitar 1 triliun sehingga dana yang dikeluarkan untuk pendidikan sebesar 19 milyar, pada tahun 2012 mendapat anggaran 1,3 triliun maka untuk biaya pendidikan sekitar 26 milyar, pada tahun 2013 mendapat anggaran 1,6 triliun dan untuk pendidikan direalisasikan sebesar 32 milyar. Selanjutnya untuk tahun 2014 sampai 2016 mendapat anggaran sekitar 1,65 triliun, sehingga dana pendidikan yang dikeluarkan rata-rata 33 milyar.

Hal ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang dimana untuk dana pendidikan dikeluarkan sekitar 20% dari APBN yang didapat dalam Provinsi Lampung. Dengan demikian semakin banyak dana yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan akan berpengaruh positif terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa.

Adanya keterkaitan antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM adalah karena kualitas pendidikan yang lebih baik akan meningkatkan kualitas SDM. Dengan adanya perbaikan kualitas SDM maka masyarakat dapat mempunyai produktivitas yang lebih baik. Produktivitas SDM yang lebih baik akan berimbas pada pertumbuhan suatu negara. Hal ini berkaitan dengan teori pertumbuhan endogen yang membahas tentang *increasing marginal return* bagi modal pengetahuan (*knowledge capital*). Peningkatan kualitas SDM tercermin pada peningkatan IPM.

Jadi dapat disimpulkan bahwa meningkatnya suatu mutu pendidikan baik itu dari SDM maupun bidang teknologi dan sebagainya sangat berpengaruh terhadap IPM, karena jika semakin banyak murid yang memperoleh pendidikan

dan memiliki kemampuan yang tinggi maka pemerintah pastinya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini akan memberikan hal positif terhadap kemajuan ekonomi dan kemajuan hidup bangsa.

b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap IPM

Hasil uji signifikansi parameter menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang bernilai positif sebesar 0,1031 artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% pada sektor kesehatan maka mengalami peningkatan IPM sebesar 0,1031 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Hal ini sesuai dengan APBN yang pemerintah keluarkan untuk biaya kesehatan sebesar 10% dari anggaran pemerintah. Pada tahun 2009 APBN pemerintah sekitar 4,2 triliun sehingga untuk kesehatan sekitar 84 milyar, pada tahun 2010 pemerintah mendapat anggaran sekitar 11,5 triliun sehingga untuk biaya kesehatan dari anggaran itu sekitar 23 milyar. Namun pada tahun 2011 pemerintah mendapat anggaran sekitar 1,45 triliun sehingga dana yang dikeluarkan untuk kesehatan sebesar 29 milyar, pada tahun 2012 mendapat anggaran 1,4 triliun maka untuk biaya kesehatan sekitar 28 milyar, pada tahun 2013 mendapat anggaran 1,5 triliun dan untuk kesehatan direalisasikan sebesar 30 milyar. Selanjutnya untuk tahun 2014 mendapat anggaran sekitar 1,45 triliun,

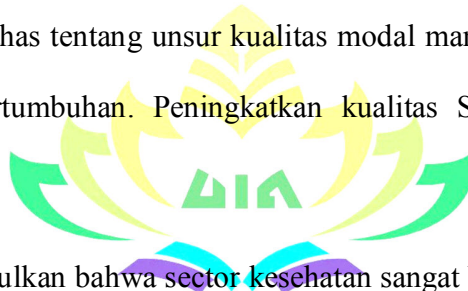
sehingga dana kesehatan yang dikeluarkan sekitar 29 miliar. Untuk tahun 2015 mendapat anggaran sekitar 2,8 triliun, sehingga dana kesehatan yang dikeluarkan sekitar 55 miliar. Pada tahun 2016 mendapat anggaran sekitar 1,6 triliun, sehingga dana kesehatan yang dikeluarkan sekitar 32 miliar.

Hal ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang dimana untuk dana kesehatan dikeluarkan sekitar 20% dari APBN yang didapat dalam Provinsi Lampung. Dengan demikian semakin banyak dana yang dikeluarkan untuk biaya kesehatan akan berpengaruh positif terhadap IPM. Pemerintah untuk meningkatkan sector kesehatan dan melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia.

Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang maka pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan, bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Keterkaitan antara pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM sangat erat, karena kualitas kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan kualitas SDM.

Adanya perbaikan kualitas SDM maka masyarakat dapat mempunyai produktivitas yang lebih baik. Produktivitas SDM yang lebih baik akan berimbas pada pertumbuhan suatu negara. Keterkaitan antara pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM sangat erat, karena kualitas kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan kualitas SDM.

Dengan adanya perbaikan kualitas SDM maka masyarakat dapat mempunyai produktivitas yang lebih baik. Produktivitas SDM yang lebih baik akan berimbas pada pertumbuhan suatu negara. Hal ini berkaitan dengan teori pertumbuhan endogen yang membahas tentang unsur kualitas modal manusia (*human capital*) ke dalam model pertumbuhan. Peningkatan kualitas SDM tercermin pada peningkatan IPM.



Jadi dapat disimpulkan bahwa sector kesehatan sangat berpengaruh terhadap IPM, karena dengan manusia yang sehat akan dapat meningkatkan SDM pada bangsa. Perlunya ditingkatkan kualitas kesehatan masyarakat sangatlah penting, dengan manusia yang memiliki tubuh yang sehat sangat baik untuk pertumbuhan suatu Negara. Sehingga pemerintah perlu memperhatikan kesehatan manusia demi kemajuan dan berkembangnya suatu Negara untuk kedepannya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah baik dari sector pendidikan dan sector kesehatan memberikan pengaruh yang positif terhadap IPM. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Clif

Laisina, dkk mengenai hasil penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dan di sektor kesehatan memiliki pengaruh. Berdasarkan hal ini pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan ke pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia bersifat positif.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang pembangunan Sumber Daya Insani di Provinsi Lampung

Perkembangan manusia dalam perspektif Islam harus didasarkan pada Maqasid al-Shariah. Potensi sumber daya insan di Provinsi Lampung sebenarnya sudah cukup untuk menjadi sebuah pasar besar dalam mencetak kesejahteraan jika dilihat dari kuantitas insannya. Untuk menyamakan persepsi di awal, kesejahteraan yang kita bahas kali ini adalah kesejahteraan yang menjaga kaidah unsur *masalah* yang memenuhi keseimbangan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Asy Syatibi tentang *masalah*, bahwa semuanya akan bermuara pada sebuah perbaikan peradaban ketika kelimanya tercapai pada tiap individu. Secara filosofis pembangunan ekonomi manusia memiliki peran untuk: *pertama*, bertauhid kepada Allah SWT. yaitu sifat manusia dalam kondisi apapun ia akan tetap mengakui dan meyakini bahwa Tuhannya adalah Esa. Maka didalam setiap perbuatannya ia akan niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah.

Kedua, manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, ini berarti bahwa setiap tindakan dan perbuatan manusia dalam hal mengembangkan sumber daya ekonomi adalah semata-mata sebagai wakil Allah untuk terus melestarikan kehidupan dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada dari diri manusia itu kah atau potensi yang ada allah berikan sebagai karunia di muka bumi allah ini. *Ketiga*, keadilan, setiap suatu pekerjaan harus didasari atas sifat adil dan merata. Islam sangat membenci adanya ketimpangan dalam hal apapu khususnya dalam perekonomian. Pemerataan distribusi kekayaan harus bersifat adil keseluruh lapisan masyarakat agar masyarakat miskin juga ikut merasakan hasil dari pembangunan ekonomi.

Pemerintah selaku pemimpin suatu daerah harus melakukan upaya-upaya yang tidak merugikan rakyat banyak seperti dalam memahami aspirasi ataupun kebutuhan masyarakat secara keseluruhan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal seperti inilah yang selalu mendapatkan maknanya, karena dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan baik itu berasal dari jalur pemerintahan, pemimpin maupun secara kemasyarakatan lewat aspirasi yang disampaikan atau diberikan oleh rakyat atau masyarakat, bila dalam proses pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan sesuai dengan harapan, maka pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak yang negative dari masyarakat. Kemudian dalam proses pelaksanaan kebijakan, pemerintah harus benar-benar dapat mengsosialisasikan kepada setiap anggota masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebijakan yang dilaksanakan tersebut dapat terealisasi dengan sebaik baiknya,

sehingga kebijakan yang sudah dilaksanakan di satu pihak tidak merugikan ataupun menghambat program pemerintah dan di lain pihak juga masyarakat merasa aspirasi mereka didengar dan sekaligus dilaksanakan serta tidak merasa dirugikan oleh pemerintah setempat.

Jadi dalam hal ini kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan, baik dalam persoalan waktu maupun pikiran. Memahami luasnya bidang cakupan pemerintah selaku pemerintah dan mengingat pula keinginan untuk menciptakan koordinasi yang sempurna antara pemerintah dengan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan pemerintah adalah dengan adanya kewibawaan dan gaya kepoloporan yang tinggi untuk diperlihatkan kepada masyarakat yang tercermin dalam diri seorang pemimpin, sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif tanpa ada paksaan dari siapapun karena merasa tergugah dengan semangat bekerja sama yang diperlihatkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan juga dapat membina masyarakat secara langsung.

Maka dari itu pemerintah harus sangat memperhatikan SDM yang ada baik dari segi pendidikan maupun segi kesehatan. Untuk saat ini pemerinta Provinsi Lampung sudah memberikan hal positif yaitu dengan adanya pembangunan sekolah-sekolah agar menjadi lebih baik lagi terutama dalam bidang IPTEK nya. Hal ini dilakukan agar SDM semakin meningkat dan semakin maju, sehingga mampu bersaing dengan Negara-negara lainnya.

Selain segi pendidikan, pemerintah juga sudah memberikan hal yang baik pada segi kesehatan. Pemerintah Provinnsi Lampung memberikan hal positif dengan

adanya pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan lainnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah dan mempermudah masyarakat untuk berobat jika sedang sakit. Upaya yang dilakukan pemerintah baik bidang pendidikan dan kesehatan sudah sangat baik demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

Sumber daya insani juga harus turut andil dalam mengembangkan ekonomi islam dengan cara terus mengembangkan potensi serta kapasitas diri sehingga dapat menjadi bagian dari pemicu perbaikan perkembangan ekonomi islam secara berkesinambungan. Lembaga pendidikan dan kesehatan juga harus turut ambil bagian dalam menyediakan wadah untuk mengembangkan potensi bagi sumber daya manusia sehingga antara kebutuhan akan fasilitas pengembang potensi dengan penyediaan layanan terfasilitasi secara seimbang. Kerja merupakan kunci untuk memanfaatkan sumber daya alam pada dasarnya, tak ada kerja berarti tak ada pendapatan.

Oleh karena itu pemerintah diupayakan untuk selalu melakukam kegiatan-kegiatan maupun selalu memperhatikan hal-hal seperti yang disebut diatas, yaitu terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan, karena menurut masyarakat yang mereka rasakan itulah yang akan menjadi pegangan mereka misalnya pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara optimal dan terbuka sehingga masyarakat bisa mendapat wawasan yang lebih dalam hal pembangunan sehingga

menjadikan mereka aktif. Peranan Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pembangunan SDI Di Provinsi Lampung khususnya dari hasil penelitian yang penulis lakukan sudah menunjukan bahwa pemerintah sudah mempunyai peranan yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan untuk menggerakkan Pembangunan khususnya SDI. karena pemerintah sering melibatkan diri atau sering terjun langsung ke lapangan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pembangunan tersebut karena pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat juga.

Disamping itu juga pemerintah dijadikan pola panutan yang tinggi sehingga masyarakat merasa terpancung untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap gerak pembangunan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa, pembangunan SDI yang ada di Provinsi Lampung yang meliputi pendidikan, kesehatan, perekonomian, seperti sekolah, tempat pelayanan kesehatan, industri usaha kecil, tempat membuat usaha kerajinan tangan dan masih banyak yang lainnya. dalam hal ini juga dilihat dari variabel penelitian maka yang telah penulis teliti mulai dari kemampuan pemerintah melaksanakan kebijakan pembangunan SDI, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan, faktor penunjang dalam pelaksanaan kebijakan untuk peningkatan pembangunan SDI serta partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan SDI yang dilaksanakan pemerintah. Maka hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa peranan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan

pembangunan SDI yang ada di Provinsi Lampung sudah dikategorikan harus terus dievaluasi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Persepektif Ekonomi Islam di Kota Bandar Lampung Tahun 2009 - 2016 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji F dapat dinyatakan bahwa secara simultan atau bersama-sama, variable pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM pada tahun 2009-2016 dengan nilai signifikan sebesar $0,004 < 0,05$ sehingga dapat di simpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 di terima. Hal ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Adi Dwi Putra pada penelitian terdahulu. Sedangkan secara parsial dari hasil uji signifikan (uji t) pada variable pengeluaran pemerintah sector pendidkan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2009-2016. Pada sector pendidikan dengan nilai signifikan $0,005 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sector kesehatan dengan nilai signifikan $0,004 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya apabila pengeluaran mengalami peningkatan maka IPM juga mengalami peningkatan.
2. Dalam Islam manusia merupakan wakil Allah dimuka bumi dalam rangka meningkatkan sumber daya insani dan potensi yang ada pada manusia. Termasuk

mengelola sumber daya Insani sebagai ciptaanNya untuk digunakan demi kesejahteraan umat. Dari sisi filosofis Islam mengajarkan tiga prinsip utama peran manusia dalam hal pembangunan ekonomi yaitu manusia harus bebrtauhid kepada Allah, manusia diciptakan sebagai wakil Allah di muka bumi, dan manusia harus selalu merapkan prinsip keadilan bagi sesama. Peran pemerintah di provinsi Lampung sejatinya masih memiliki banyak kekurangan di segala lini dalam meningkatkan SDI dikarnakan banyak factor yang melatar belakangi permasalahan tersebut salah satunya masih banyaknya praktik korupsi kolusi nepotisme yang mana dalam islam tidak di anjurkan praktik-praktik tersebut, meski mayoritas taat beragama.

Di lain sisi peranan Pemprov Lampung di bidang pendidikan aadalah meningkatkan infratraktur pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi unit sekolah dan membangun ruang persputakan dan laboratorium sekolah. Dan juga melakukan peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pengajar melalui pemberian dana insentif bagi guru honorer dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik didaerah terpencil melalui program Lampung mengajar.

B. Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Melihat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung, maka diharapkan pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan realisasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sector pendidikan. Pemerintah Provinsi Lampung harus mengalokasikan 20% dari total APBD untuk sektor pendidikan sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 49 tentang pendidikan. Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain :

- memberikan bantuan-bantuan pendidikan berupa beasiswa, perbaikan gedung-gedung sekolah yang kurang layak, dan menambah fasilitas-fasilitas pendidikan seperti buku-buku bacaan di setiap institusi pendidikan yang ada di Provinsi lampung. Terlebih di sektor kesehatan di melihat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung, maka diharapkan pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan realisasi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan. Pemerintah Provinsi Lampung harus mengalokasikan 10% dari total APBD untuk sektor kesehatan sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009 Pasal 171 tentang kesehatan. Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain:

- menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, melakukan penyuluhan-penyuluhan kesehatan, serta mengadakan pengobatan-pengobatan gratis bagi masyarakat miskin.
2. Masyarakat harus mampu mendorong dan mendukung seluruh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan kualitas manusia. Masyarakat sebagai obyek daripada pembangunan insani harus mampu mandiri dan tidak selalu bergantung kepada pemerintah untuk mampu meningkatkan kualitas hidupnya masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Prayudha, *Determinan Pembangunan Manusia Provinsi Lampung*, Tesis FEB Universitas Lampung, 2013
- Basri, faisal, *Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, Jakarta, 2002
- BPS.2000-2016. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung*, beberapa terbitan. BPS Provinsi Lampung. Lampung
- Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta: 2001)
- Galih, (2012), *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Melek Huruf Perempuan Dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan Di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi S1*, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Mankiw, N. Gregory, *Macroeconomics* 6 th Edition, Worth Publishers 41. Madison Avenue New York, NY, 2005
- Mudrajat, Kuncoro. 2013, *Indikator Ekonomi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Jusmaliani.. *Pengelolaan Sumber Daya Insani*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011
- Prof. Dr.H. Viethzal Rivai ,MBA , *Islamic Human Capital*, (Jakarta : Rajawali Pers 2009)

Putra, Adi Dwi, *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung*, FEB Universitas Lampung, 2015

Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2013

Sodik, J, 2007, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.12 No. 1 April 2007 h. 27-36, UVN Veteran Yogyakarta.

Sugiarto A. Santoso dkk, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh*, *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1 No 4, November 2013

Suharto, Edi., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung Refika Aditama, 2010

Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung : PT. Tarsito, 2009)

Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan, Proses masalah dan Dasar Kebijakan, Cetakan ketiga*, (Jakarta: Kencana), 2006

Suminto, *Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara*, Sebagai bahan penyusunan Budget in Brief 2004 , (Jakarta: Ditjen Anggaran Departemen Keuangan) , 2004

Tjiptoherijanto, Prijono, *Untaian Pembangunan Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: FEUI, 1998)

Todoro, M. P. & Semith, S. C 2003 *Economic Develomen, Eighth Edition*.
PT.Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Usman, Husaini dan Setiadi, *Pengantar Statistika*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)

V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian* , (Yogyakarta : Pustaka Baru Pers, 2015)

UNDP. *Human Right and Human Development*. Human Development Reports 2000.
New York: Oxford University Press, 2000

<http://lampungprov.go.id/page/detail/sejarah-lampung.html>. Diakses pada Hari Kamis, 26
Januari 2017, Jam 19:45



